



Systematic Literature Review : Pemberdayaan Masyarakat Inklusif Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial

Hidayatus Sholichah, Adam Hafidz Al Fajar*, Syamraeni, Mudfainna
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Kata Kunci

Kata kunci: Keadilan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Inklusif, Systematic Literature Review

Abstrak

Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan akan pemberdayaan masyarakat yang lebih inklusif sebagai langkah untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial yang terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pendekatan pemberdayaan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, agar tercipta keadilan sosial berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR), yang mencakup analisis literatur mengenai pemberdayaan inklusif, inklusi sosial, serta dampaknya pada aspek pendidikan dan kesehatan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber akademis yang relevan, diterbitkan antara tahun 2019 hingga 2023, untuk memastikan keterkaitan dengan tren terbaru dalam pembangunan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat inklusif memperkuat akses pendidikan dan kesehatan bagi semua kalangan, terutama kelompok yang terpinggirkan. Di bidang pendidikan, pendekatan inklusif meningkatkan partisipasi dan potensi individu, yang berujung pada pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi. Pada aspek kesehatan, akses yang lebih baik bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas dan masyarakat miskin, memastikan pemerataan layanan kesehatan melalui fasilitas ramah difabel dan layanan digital seperti e-counseling untuk penanganan stunting. Kesimpulannya, pemberdayaan inklusif memainkan peran krusial dalam mewujudkan keadilan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih tangguh, inklusif, dan berdaya saing.

Keywords

Keywords: Social Justice, Inclusive Community Empowerment, Systematic Literature Review

Abstract

The urgency of this research arises from the need for more inclusive community empowerment as a measure to address growing social inequality. This research aims to explore empowerment approaches that involve all levels of society, including vulnerable groups, in order to create sustainable social justice. The research method used is Systematic Literature Review (SLR), which includes analysing the literature on inclusive empowerment, social inclusion, and its impact on education and health. Data was collected from various relevant academic sources, published between 2019 and 2023, to ensure relevance to the latest trends in social development. The results show that inclusive community empowerment strengthens access to education and health for all, especially marginalised groups. In education, inclusive approaches increase participation and individual potential, leading to reduced social and economic inequality. In health, better access for vulnerable groups, such as people with disabilities and the poor, ensures equitable distribution of health services through disability-friendly facilities and digital services such as e-counselling for stunting. In conclusion, inclusive empowerment plays a crucial role in realising social justice and creating a more resilient, inclusive and competitive society.

*Corresponding Author Adam Hafidz Al Fajar, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Email: 23202032008@student.uin-suka.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.29303/jseh.v11i1.664>

History Artikel:

Received: 02 November 2024 | Accepted: 27 Maret 2025

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, konsep pemberdayaan masyarakat telah mengalami perubahan signifikan jika sebelumnya pemberdayaan masyarakat lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dan infrastruktur, kini paradigma baru mengarah pada pemberdayaan yang lebih inklusif, yang memperhitungkan aspek sosial, budaya, dan politik. (Amsari et al., 2024) Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang menghargai keberagaman, memberikan akses yang adil bagi semua anggota, termasuk kelompok marginal seperti penyandang disabilitas, perempuan, dan minoritas lainnya. (Ra'is, 2018) Konsep ini berakar pada prinsip keadilan sosial yang menekankan distribusi sumber daya, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan pengakuan atas hak-hak individu dalam masyarakat. Perubahan ini didorong oleh kesadaran bahwa ketidakadilan struktural dan diskriminasi sosial seringkali menghalangi kelompok-kelompok marginal untuk mencapai potensi penuh mereka. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan tradisional dalam pemberdayaan cenderung tidak memadai dalam mencapai keadilan sosial. Adapun berdasarkan hasil penelitian dari Fathy (2019) yang mengungkapkan bahwa banyak program pemberdayaan hanya berhasil memperkuat ketidaksetaraan karena tidak melibatkan kelompok rentan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan konvensional, pemberdayaan masyarakat inklusif muncul sebagai strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Meskipun pemberdayaan masyarakat inklusif telah diakui sebagai pendekatan yang lebih manusiawi dan adil, penerapannya masih diwarnai kontroversi. Salah satu perdebatan yang muncul adalah bagaimana inklusivitas diterapkan di berbagai konteks sosial. Adapun konsep inklusivitas sering kali diterjemahkan secara berbeda di berbagai negara, tergantung pada kondisi budaya, sosial, dan politik. (Supriatna, 2009) Hal ini menyebabkan implementasi yang tidak seragam dan kadang-kadang bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Di sisi lain, terdapat pandangan yang menekankan bahwa tanpa pemberdayaan inklusif, ketidakadilan sosial akan terus berlanjut, mengingat ketimpangan akses dan distribusi sumber daya yang masih menjadi masalah di banyak negara berkembang. (Anwar, 2022) Secara global, pemberdayaan masyarakat inklusif menjadi tren yang semakin kuat, terutama setelah adopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) oleh PBB pada 2015, yang menekankan inklusivitas dan penghapusan ketimpangan sebagai salah satu target utama. (Panuluh & Fitri, 2016) Adapun SDG yang kesepuluh bertujuan untuk mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara, menegaskan pentingnya pemberdayaan

kelompok rentan agar mereka dapat menikmati hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. (Sulaiman, 2021) Tren ini juga tercermin dalam kebijakan-kebijakan pemerintah di banyak negara yang mulai merangkul pendekatan inklusif dalam pembangunan masyarakat. Sebagaimana di negara Indonesia terdapat inisiatif seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang menargetkan rumah tangga miskin, terutama yang dipimpin oleh perempuan, dan memberikan mereka akses lebih luas terhadap layanan sosial dan ekonomi. (Isdijoso et al., 2016) Penelitian oleh Pellu (2024) menemukan bahwa program-program berbasis inklusivitas ini menunjukkan hasil yang positif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, meskipun tantangan tetap ada dalam hal pelaksanaannya di lapangan, seperti minimnya partisipasi aktif dari penerima manfaat dalam proses perencanaan program. Penelitian lain dari Ngoyo (2015) mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat inklusif juga didorong oleh tren meningkatnya partisipasi masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan publik, yang membuat kelompok-kelompok marginal untuk bersuara lebih kuat dalam forum-forum kebijakan. Ini menunjukkan bahwa inklusivitas bukan hanya tren kebijakan, tetapi juga mencerminkan perubahan dalam struktur sosial di mana masyarakat semakin menuntut keterlibatan aktif dalam menentukan nasib mereka.

Pemberdayaan masyarakat inklusif kini menjadi semakin mendesak, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti pandemi COVID-19. Pandemi telah memperlihatkan kerentanan kelompok-kelompok marginal yang lebih besar terhadap krisis, baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Studi oleh Luthfia (2020) menunjukkan bahwa di Indonesia, kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat miskin di pedesaan paling terdampak oleh pandemi, dengan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan bantuan sosial. Krisis ini menunjukkan bahwa tanpa adanya pendekatan yang inklusif, kelompok-kelompok rentan akan semakin termarginalisasi dalam situasi darurat. Adapun menurut Hakim (2024) kesenjangan sosial semakin melebar akibat pandemi, yang memperlihatkan pentingnya mempercepat implementasi pemberdayaan masyarakat inklusif sebagai bagian dari strategi pemulihan pasca-pandemi. Kebutuhan mendesak untuk menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat inklusif juga diperkuat oleh berbagai laporan tentang meningkatnya ketidakadilan sosial dan ekonomi yang timbul sebagai akibat dari perubahan iklim, bencana alam, dan konflik sosial. Penelitian oleh Sudarsana (2015) menunjukkan bahwa masyarakat yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim adalah kelompok-kelompok yang telah lama terpinggirkan secara ekonomi dan politik. Oleh karena itu, pemberdayaan inklusif tidak hanya penting untuk mencapai keadilan sosial, tetapi juga krusial dalam

membangun ketahanan masyarakat terhadap berbagai ancaman di masa depan.

Adapun bagi penulis penelitian ini menjadi penting karena mengandung beberapa alasan yakni : 1) ketidaksetaraan sosial masih menjadi masalah global yang signifikan. Banyak kelompok marginal, seperti perempuan, penyandang disabilitas, minoritas etnis, dan masyarakat miskin, terus menghadapi kesenjangan akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan layanan sosial. 2) dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 10 yang bertujuan mengurangi ketimpangan. Pemerintah dan lembaga internasional membutuhkan bukti empiris tentang bagaimana strategi inklusif dapat diterapkan secara efektif untuk mempersempit jurang kesenjangan sosial dan ekonomi. 3) memberikan bukti ilmiah tentang bagaimana kebijakan berbasis inklusivitas dapat memperkuat tatanan sosial, mengurangi konflik, serta mendorong kohesi sosial yang lebih baik di masyarakat yang beragam.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, Teknik pengumpulan data menggunakan “*Systematic Literature Review*” (SLR). Metodologi ini dipilih karena kemampuannya untuk menerapkan pendekatan yang menyeluruh, ketat, dan tidak memihak untuk proses tinjauan literatur lainnya. Selain itu menurut Vårheim et al., (2019) juga menegaskan bahwa untuk memastikan kredibilitas hasil, sangat penting untuk melakukan tinjauan kualitatif sistematis yakni dengan mendokumentasikan pencarian komprehensif dan prosedur transparan Adapun langkah-langkah sebagai berikut, Pertama, menentukan scope review, yakni kriteria eksplisit untuk menentukan arah penelitian. Adapun hal ini peneliti rumuskan dalam bentuk RQ (Research Question), yakni pemberdayaan masyarakat Inklusif untuk mewujudkan keadilan sosial. Adapun hal ini menjadi objek penelitian dikarenakan terdapat beberapa alasan yakni 1) ketidaksetaraan sosial yang berkelanjutan, 2) pentingnya inklusi sosial dalam pembangunan berkelanjutan, 3) urgensi sosial akibat peningkatan eksklusi sosial. Adapun terdapat 3 RQ (Research Question) yakni RQ1 bagaimana pemberdayaan masyarakat inklusif dapat mengatasi ketidaksetaraan sosial yang berkelanjutan? RQ2 Sejauh mana inklusi sosial berperan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan sosial? RQ3 Apa strategi pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam mengatasi peningkatan eksklusi sosial di era

modern? Kedua, tahapan pencarian literatur, yang melibatkan kata-kata kunci dengan tujuan pencarian informasi. Dalam konteks ini, search string atau susunan kata kunci pencarian disusun untuk mendapatkan hasil yang komprehensif. Database penelitian ini adalah “Google Scholar”. Adapun kata kunci dalam penelitian ini yakni pembangunan masyarakat inklusif, pembangunan dan inklusi sosial, strategi inklusi untuk keadilan sosial. Ketiga, tahapan penyaringan literatur, yang dilakukan dengan menyaring karya-karya yang tidak masuk dalam ruang lingkup penelitian. Pada tahapan ini, penulis menggunakan beberapa kriteria sebagai pengejawantahan prinsip pemberdayaan masyarakat inklusif dalam SLR, yakni 1) literatur harus relevan dengan tema penelitian, atau dalam arti lain harus mengandung tiga item, 2) literatur harus dipublikasikan antara tahun 2019 sebagai awal kemunculan terkait penelitian “pemberdayaan masyarakat inklusif untuk mewujudkan keadilan sosial” 3) literatur harus berkaitan dengan ketiga kata kunci tersebut sebagai fokus utama dalam topik penelitian; 4) literatur harus sesuai dengan empat kriteria yang telah disebutkan. Setelah melalui telaah mendalam terhadap judul, kemudian dibantu oleh program “*Publish or Perish*” (PoP). Keempat, analisis dengan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk menilai pengolahan data studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan terhadap hasil penelitian pada masyarakat disajikan dalam bentuk uraian bahasan sesuai tujuan kegiatan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasil kegiatan juga membahas respon masyarakat baik yang sifatnya mendukung (positif) maupun hambatan (negative) yang dapat didukung dengan satu judul gambar saja (dapat berisikan beberapa gambar kegiatan). Jika diperlukan table, dapat pula disajikan table bersangkutan.

Pemberdayaan masyarakat inklusif adalah proses yang bertujuan untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang rentan, seperti kaum difabel, perempuan, dan masyarakat miskin, dalam pengambilan keputusan dan kegiatan pembangunan. (Ra'is, 2018) Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata, di mana setiap individu, tanpa memandang latar belakang, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. (Hafshah & Nugraheni, 2024) Dalam konteks ini, keadilan sosial bukan hanya sekadar distribusi sumber daya yang adil, tetapi juga tercapainya kesetaraan dalam akses terhadap peluang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi

politik. Ciri-ciri pemberdayaan masyarakat inklusif meliputi : 1) partisipasi aktif semua kelompok masyarakat termasuk individu yang terpinggirkan, agar mereka dapat terlibat langsung dalam proses pembangunan. 2) pengakuan terhadap keragaman yakni dengan mengakui bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kelompok dengan kebutuhan yang berbeda, dan setiap kelompok memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. 3) penyediaan akses yang setara dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan publik, agar tidak ada kelompok yang tertinggal. 4) Penguatan kapasitas individu melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan, agar masyarakat mampu mandiri dan terlibat dalam pembangunan jangka panjang. 5) Keadilan redistributive yang menjamin bahwa sumber daya dialokasikan secara adil kepada mereka yang paling membutuhkan, terutama kelompok rentan. Pemberdayaan masyarakat inklusif memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial karena masyarakat yang inklusif memberikan ruang bagi semua individu untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ketika seluruh lapisan masyarakat dilibatkan, keputusan yang diambil akan lebih mencerminkan kepentingan umum, bukan hanya kelompok dominan. Dengan demikian,

masyarakat yang inklusif mampu mengatasi ketidakadilan struktural yang seringkali menempatkan kelompok rentan dalam posisi yang kurang menguntungkan. Selain itu, inklusivitas memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang ditinggalkan dalam proses pembangunan, sehingga mengurangi ketimpangan sosial yang sering kali menjadi pemicu konflik dan ketidakstabilan. Sebagaimana contohnya adalah akses yang setara terhadap pendidikan bagi kaum difabel untuk berkontribusi lebih optimal dalam dunia kerja dan masyarakat secara luas. Hal ini tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga memberikan dampak positif pada masyarakat, di mana potensi semua individu dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dengan adanya penguatan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan, kelompok-kelompok yang biasanya termarginalisasi dapat menjadi lebih mandiri dan berdaya. Ini juga mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan eksternal dan mendorong terjadinya pembangunan yang berkelanjutan. Pada akhirnya, pemberdayaan masyarakat inklusif menciptakan masyarakat yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan, di mana setiap individu dapat mencapai potensi maksimal yang dimiliki oleh setiap individu.

Tabel 1. Pemberdayaan Masyarakat Inklusif Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial

No	Penulis	Tahun	Topik	Metode Penelitian	Source
1	Prima Putra Budi Gutama, Bambang Widiyahseno	2020	Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa	Kualitatif	http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1733883&val=14834&title=INKLUSI%20SOSIAL%20DALAM%20PEMBANGUNAN%20DESA
2	Hastuti, Rika Kumala Dewi, Rezanti Putri Pramana, Hariyanti Sadaly	2020	Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas	Kualitatif dan Kuantitatif	http://smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp_disabilitas_in_0.pdf
3	Tri Hariyono	2020	Partisipasi Perempuan Desa Karang Sari Dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusif	Kualitatif	https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/slamicreview/article/view/234/162
4	Elsy Renie	2020	Partisipasi Perempuan Dalam Ekonomi Inklusif	Kualitatif	https://core.ac.uk/download/pdf/288296055.pdf
5	Nurul Aldha Mauliddina Siregar, Arief Purbantara	2020	Melawan Stigma Diskriminatif : Strategi Pemberdayaan Penyandang	Kualitatif	https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/JPMI/article/view/041-02/1331

			Disabilitas di Desa Panggungharjo		
6	Arni Surwanti, Warih Andan Puspitosari	2021	Penguatan Kader Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Guna Mewujudkan Masyarakat Yang Inklusi	Pengabdian Masyarakat	https://prosiding.umy.ac.id/semnasppm/index.php/psppm/article/view/199/93
7	Retno Kusumawiranti	2021	Pengarusutamaan Gender Dan Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa	Kualitatif	https://ejournal.widyamataran.ac.id/index.php/populika/article/view/348/221
8	Mustika Diana, Yanto, Redi Pirmansyah	2021	Pemberdayaan Masyarakat melalui Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Perpustakaan Sumber Ilmu Desa Marga Sakti Kabupaten Musirawas	Kualitatif	http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/TI/article/view/2389/0
9	Rindi Antiwi	2021	Strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah Dalam Pengelolaan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Kualitatif	http://repository.uinsu.ac.id/12624/
10	Faiqul Hazmi, Zahrotun Nafisah	2021	Evaluasi Dampak Penyaluran Pembiayaan Mikro Syariah Pada Kesetaraan, Keadilan Gender dan Inklusi Sosial.	Kualitatif	https://journal.uir.ac.id/index.php/tabaru/article/view/6268/3096
11	Ulfah Fatmala Rizky	2021	Pelatihan Inklusif Advokasi Kebijakan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Komunitas SOBAT Difabel	Pengabdian Masyarakat	https://ejournal.ipdn.ac.id/cc/article/view/1783/972
12	Nurul Fitriani Eko Saputro	2021	Nilai-Nilai Inklusif dalam Program Pendampingan Disabilitas di Rumah Inklusif Kebumen	Kualitatif	https://eprints.uinsizu.ac.id/11164/1/NURUL%20FITRIAN%20EKO%20SAPUTRO_NILAI-NILAI%20INKLUSIF%20DALAM%20PROGRAM%20PENDAMPINGAN%20DISABILITAS%20DI%20RUMAH%20INKLUSIF%20KEBUMEN.pdf
13	Insiatun Insiatun, Gardiana Karya, Ediyanto Ediyanto, Asep Sunanda	2021	Implementasi Pendidikan Inklusi Pada Jenjang PAUD	Kualitatif	https://journal3.um.ac.id/index.php/fip/article/view/1291/1171

14	Novita Maulida Ikmal, Nur Holifah, Lutfia Nurul Hidayati, Persiana Nofrianti Moi,	2022	Pengarustamaan Pelayanan Publik Inklusif di Tingkat Desa	Kualitatif	https://proceedings.goodwoodconferences.com/index.php/sai/article/view/34/28
15	Warah Andan Puspitosari, Faudyan Eka Satria, Arni Surwati, , Iswanto,	2022	Tantangan Mewujudkan Kampus Inklusi di Pendidikan Tinggi dalam Telaah Literatur	Kualitatif	https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK/article/view/6434/3535
16	Ragil Tri Atmi, Endang Gunarti, Fitri Mutia, Ismi Choirunnisa Prihatin	2022	Peningkatan Literasi Masyarakat Melalui Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial	Pengabdian Masyarakat	https://riset.unisma.ac.id/index.php/jipemas/article/view/15559/14292
17	Choirul Muna ,Zukhruf Arifin, Rifaldi Mauliansyah	2022	Mewujudkan Pembangunan Inklusi: Peran Rumah Kebugaran Difabel (RKD) di Yogyakarta	Kualitatif	https://journal.ugm.ac.id/v3/JSDS/article/view/5223/2203
18	Ignasia Yunita Sari,Diah Pujiastuti, Nining Indrawati, Indah Prawesti, Ethic Palupi, Santahana Febriyanti	2023	Upaya Penanganan Stunting Melalui Ecounseling Dengan Pendekatan Inklusi di Rural Area	Pengabdian Masyarakat	https://doi.org/10.36257/aps.v6i4.8322
19	Rahmawati, Heru Adi Putranto	2023	Model Layanan Publik Ramah Difabel Inisiatif Membangun Kota Inklusi	Kualitatif	https://journal.umpr.ac.id/index.php/pecerah/article/view/4964/3142
20	Muhammad Rifqi	2024	Peran Forum Bangun Aceh (FBA) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Inklusi Sosial Melalui Kelompok Swadaya Masyarakat Ingin Maju (Studi Di Gampong Luthu Dayah Krueng Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar).	kualitatif	https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34455/1/Muhammad%20Rifqi%2C%20190404030%2C%20FDK%2C%20PMI.pdf

Pemberdayaan Masyarakat Inklusif Dalam Mengatasi Ketidaksetaraan Sosial

1. Inklusi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Inklusi sosial memiliki hubungan yang erat dengan pemberdayaan masyarakat, karena keduanya bertujuan untuk memastikan partisipasi penuh semua individu dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian dari Prima Putra Budi Gutama, dan Bambang Widiyahseno (2020) dapat diketahui bahwa terdapat keterkaitan antara inklusi sosial dan pemberdayaan yang mana Pemberdayaan merupakan langkah penting untuk membangun kemandirian dan kemampuan masyarakat, terutama bagi kelompok yang terpinggirkan, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan yang menegaskan bahwa masyarakat harus diposisikan sebagai subjek dalam pembangunan, bukan sekadar objek. Ini berarti bahwa masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk terlibat dalam proses pembangunan yang mempengaruhi kehidupan mereka, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketidaksetaraan sosial. (Gutama & Widiyahseno, 2020) Konsep ini diperkuat oleh Dewi et al., (2020) yang menunjukkan bahwa Inklusi sosial dan pemberdayaan saling terkait erat dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Pemberdayaan berfungsi sebagai langkah krusial untuk membangun kemandirian dan kemampuan individu, terutama bagi kelompok yang terpinggirkan, termasuk penyandang disabilitas. Dengan memberdayakan masyarakat, mereka tidak hanya menjadi objek dari kebijakan pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif berpartisipasi dalam proses tersebut. Partisipasi aktif ini menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ketika masyarakat diakui sebagai subjek dalam pembangunan, mereka dapat menyuarakan kebutuhan dan aspirasi yang pada gilirannya dapat mengurangi ketidaksetaraan sosial. Dengan demikian, inklusi sosial yang efektif tidak hanya menciptakan akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan layanan, tetapi juga memperkuat posisi masyarakat dalam proses pembangunan, memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang latar belakang, memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan yang berlangsung.

Adapun sebagaimana dalam pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh Ulfah

Fatmala Rizky (2021) menghasilkan pengetahuan bahwa Pelatihan ini menghasilkan beberapa hal yang berkaitan dengan inklusi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi ketidaksetaraan sosial, antara lain: 1) terjadinya peningkatan kesadaran dan pengetahuan yang mana dalam pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran peserta mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan pentingnya advokasi. Dengan pengetahuan yang lebih baik, peserta diharapkan dapat berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan orang lain di komunitas mereka. 2) terdapat keterlibatan penyandang disabilitas dimana pelatihan ini melibatkan penyandang disabilitas secara langsung, memberikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses advokasi. Hal ini mendukung inklusi sosial dengan memastikan bahwa suara penyandang disabilitas didengar dan diperhitungkan dalam kebijakan yang mempengaruhi mereka. 3) dalam pelatihan ini juga memperhatikan aksesibilitas bagi peserta penyandang disabilitas, yang merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. Dengan menyediakan akses yang memadai, pelatihan ini membantu menghilangkan hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam berpartisipasi dalam kegiatan sosial. 4) penerapan pengetahuan yang mana dalam hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta merasa bahwa pelatihan ini bermanfaat dan mereka bersedia untuk menerapkan pengetahuan yang didapat dalam kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya memberikan teori, tetapi juga mendorong tindakan nyata dalam masyarakat. 5) dalam pelatihan ini mengajarkan bahwa advokasi untuk hak-hak penyandang disabilitas dapat dilakukan tanpa biaya tinggi, sehingga lebih banyak orang dapat terlibat dalam proses ini. Ini membantu memberdayakan masyarakat untuk berjuang demi hak-hak mereka tanpa harus bergantung pada jasa advokat yang mahal. Secara keseluruhan, pelatihan ini berkontribusi pada inklusi sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterlibatan, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta mendorong tindakan advokasi yang lebih luas dalam masyarakat. Sejalan dengan hal ini, maka penelitian Nurul Fitriani Eko Saputro (2021) menyoroti terkait dengan penerapan nilai-nilai inklusif dalam program pendampingan disabilitas yang mana fokusnya meliputi kesetaraan, di mana penyandang disabilitas dan masyarakat umum mendapat akses yang sama terhadap sumber daya. Program ini juga

mendorong komunikasi terbuka, kepedulian sosial, dan penghargaan terhadap perbedaan. Pendampingan dilakukan secara fleksibel, menyesuaikan kebutuhan disabilitas. Nilai kesatuan menekankan bahwa penyandang disabilitas adalah bagian integral dari masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya pemberdayaan penyandang disabilitas, tidak hanya melalui pendidikan, tetapi juga dalam penguatan peran mereka di masyarakat.

2. Pemberdayaan Perempuan dalam Pendekatan Inklusif

Adapun menurut penelitian dari Hariyono (2020) terdapat beberapa peran utama dari pendekatan inklusif bagi perempuan yang mana membantu dalam mengatasi ketidaksetaraan sosial yaitu : 1) Pendekatan inklusif memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memberdayakan perempuan, mereka dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan, baik di tingkat desa maupun dalam konteks yang lebih luas. 2) Melalui pendekatan inklusif, perempuan diberikan akses yang lebih baik terhadap sumber daya, seperti pendidikan, pelatihan, dan modal usaha. Hal ini dapat memberikan pengaruh kepada perempuan untuk memanfaatkan aset desa dan berkontribusi pada ekonomi lokal, terutama dalam sektor pertanian, UMKM, dan pariwisata yang mana sebelumnya hanya diberikan atau dipercayakan kepada pihak laki-laki. 3) Pendekatan inklusif juga berguna untuk memastikan bahwa suara perempuan didengar dalam forum-forum seperti Musyawarah Desa (Musdes). Dengan adanya partisipasi aktif, perempuan dapat menyuarakan kebutuhan dan aspirasi yang penting untuk menciptakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhannya. Sejalan dengan hasil penelitian ini, maka Elsy Renie (2020) juga menyatakan bahwa 3 hal tersebut berhubungan dengan penelitian yang mana penjelasannya sebagai berikut : 1) partisipasi perempuan dalam ekonomi inklusif dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, yang sejalan dengan peran pendekatan inklusif yang memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memberdayakan perempuan, mereka dapat berkontribusi lebih aktif dalam pembangunan di berbagai tingkat, baik di desa maupun secara lebih luas. 2) Pendekatan inklusif yang memberikan akses yang lebih baik kepada perempuan terhadap pendidikan, pelatihan, dan

modal usaha sangat penting. Penelitian ini mencatat bahwa meskipun perempuan masih tertinggal dalam beberapa aspek, partisipasi mereka dalam pendidikan dan pekerjaan menunjukkan perkembangan. Akses yang lebih baik terhadap sumber daya perempuan guna memanfaatkan aset desa dan berkontribusi pada ekonomi lokal, terutama di sektor-sektor yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki, seperti pertanian dan UMKM. 3) partisipasi aktif perempuan dalam ekonomi inklusif dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan dan memastikan bahwa suara mereka didengar dalam proses pembangunan.

3. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam Masyarakat Inklusif

Adapun berdasarkan hasil penelitian dari Nurul Aldha Mauliddina Siregar, Arief Purbantara (2020) menunjukkan bahwa melalui program pemberdayaan dan keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam kegiatan masyarakat, terjadi perubahan positif dalam cara pandang masyarakat terhadap mereka. Masyarakat mulai melihat penyandang disabilitas sebagai individu yang memiliki potensi dan kemampuan, bukan hanya sebagai objek belas kasihan atau ketidakmampuan. Bukan hanya itu, penyandang disabilitas yang terlibat dalam program-program budaya dan kesenian dapat menunjukkan bahwa mereka dapat berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan komunitas. Hal ini tidak hanya meningkatkan rasa percaya diri mereka, tetapi juga mengubah cara masyarakat memandang peran mereka dalam masyarakat. Dalam penelitian ini juga dibahas bahwa keberadaan "*local champion*" seperti kepala desa dan ketua komunitas penyandang disabilitas berperan penting dalam mendorong inisiatif pemberdayaan dan mengurangi stigma dan diskriminasi sosial di masyarakat.

4. Implementasi Pendidikan Inklusif dalam Mengatasi Ketidaksetaraan Sosial

Adapun dalam pemberdayaan implementasi pendidikan yang inklusif diperlukan oleh setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau fisik, memiliki akses yang setara untuk belajar dan berkembang. Dengan menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, potensi setiap individu dapat dioptimalkan. Hal ini membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi serta membuka peluang lebih luas bagi kelompok yang termarginalkan, yang pada gilirannya memperkuat fondasi pembangunan

berkelanjutan yang berkeadilan sosial. Sejalan dengan konsep ini berdasarkan hasil penelitian dari Diana et al., (2021) yang menunjukkan bahwa dalam konteks pendidikan dan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan sosial yakni perpustakaan sebagai sumber ilmu di desa dapat menunjukkan bagaimana perpustakaan dapat berfungsi sebagai lembaga inklusi sosial yang memberdayakan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam bidang pendidikan. Ada beberapa alasan yang diungkapkan dalam hasil penelitian dari Diana et al., (2021) tentang bagaimana inklusi sosial di bidang pendidikan dapat memberdayakan masyarakat secara inklusif yaitu 1) Perpustakaan dapat menyediakan berbagai kegiatan yang terbuka untuk semua anggota masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Sebagaimana contohnya dalam kegiatan belajar menari untuk anak-anak dari berbagai tingkat pendidikan menunjukkan upaya untuk menciptakan akses yang setara bagi semua individu. 2) Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan produktif seperti budidaya jangkrik dan pembuatan keripik pare, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai pusat informasi tetapi juga sebagai tempat untuk meningkatkan keterampilan dan potensi ekonomi warga desa. Ini membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat. 3) Program yang terdapat dalam perpustakaan dapat berperan dalam memberdayakan kelompok yang terpinggirkan dengan memberikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi mereka dan berkontribusi pada kesejahteraan komunitas. Sejalan dengan hal ini, hasil penelitian dari Rindi Antiwi (2021) juga menunjukkan bahwa perlu adanya strategi untuk mengelola perpustakaan berbasis inklusi sosial mencakup beberapa aspek penting, yang ditujukan untuk memastikan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Adapun beberapa poin strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1) penyediaan koleksi bahan bacaan yang beragam. Perpustakaan berusaha menyediakan koleksi yang mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk buku dan materi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Ini mencakup koleksi yang ramah disabilitas, seperti buku braille atau materi audio. 2) penyediaan layanan perpustakaan yang inklusif. Dinas Perpustakaan berkomitmen untuk memberikan layanan yang dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Ini mencakup pelatihan bagi pustakawan untuk

memahami dan memenuhi kebutuhan khusus pengguna dengan disabilitas. 3) terdapat sarana dan prasarana yang mendukung. Perpustakaan dilengkapi dengan fasilitas yang ramah disabilitas, seperti aksesibilitas fisik dan teknologi yang mendukung, seperti perangkat lunak pembaca layar. 4) mengadakan promosi dan kegiatan yang menarik. Dinas Perpustakaan juga melakukan promosi aktif untuk menarik perhatian masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Kegiatan yang diselenggarakan di perpustakaan dirancang untuk melibatkan semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas, sehingga mereka merasa diterima dan terlibat. Dengan demikian dapat terjadi inklusifitas sosial di bidang pendidikan yang mana mampu mengarahkan pendidikan menjadi lebih inklusif yang bisa dijangkau untuk semua kalangan termasuk disabilitas. Hal ini dapat menimbulkan dampak positif yang berkelanjutan. Sejalan dengan hal ini, maka berdasarkan hasil pengabdian dari Atmi et al., (2022) diketahui bahwa kegiatan pelatihan yang diadakan untuk pengelola perpustakaan desa membantu masyarakat dalam memahami pentingnya layanan berbasis inklusi sosial. Dengan demikian perpustakaan desa dapat lebih aktif dalam melayani masyarakat, termasuk difabel, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dalam bidang pendidikan.

Adapun ternyata implementasi pendidikan inklusi juga sudah diterapkan sejak dalam jenjang PAUD, sebagaimana hasil penelitian literature dari Insiatun et al., (2021) yang menunjukkan beberapa temuan penting terkait dampak pendidikan inklusif terhadap siswa jenjang PAUD dan guru PAUD. Adapun bagi siswa PAUD yakni : 1) pendidikan inklusif berpotensi meningkatkan partisipasi dan prestasi siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Dengan adanya pendekatan yang inklusif, siswa dapat belajar dalam lingkungan yang mendukung, yang dapat meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi siswa PAUD. 2) memberikan pengembangan sosial dan emosional bagi siswa PAUD yang mana mereka mulai belajar berinteraksi dengan teman sebaya yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda sehingga hal ini mampu membangun empati dan toleransi bagi siswa PAUD. 3) dapat mengembangkan keterampilan adaptasi bagi siswa yang memiliki kebutuhan khusus dalam lingkungan yang inklusif dimana mereka mendapatkan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan mereka. Adapun bagi guru PAUD yakni : 1) guru dapat memiliki pengetahuan dan

keterampilan yang memadai untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif. 2) Guru di sekolah inklusif diharapkan untuk menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah, yang mencakup perencanaan dan evaluasi program yang sesuai dengan kebutuhan siswa. 3) Guru yang terlibat dalam pendidikan inklusif sering kali menunjukkan komitmen yang tinggi dan motivasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil dan inklusif. Namun, mereka juga membutuhkan dukungan dari pihak sekolah dan pemerintah untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi.

Dalam bidang perguruan tinggi, pendidikan inklusi diperlukan untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, fisik, atau mental, memiliki kesempatan yang setara untuk belajar dan berkembang. Sebagaimana hasil penelitian literature oleh Puspitosari et al., (2022) yang memberikan beberapa poin penting yakni: 1) hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas dijamin oleh Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), menegaskan bahwa inklusi adalah bagian dari hak asasi manusia. 2) pengembangan individu menjadi lebih optimal di lingkungan yang mendukung keragaman kemampuan fisik dan mental, menciptakan suasana di mana semua mahasiswa dapat berkontribusi dan berkembang. 3) konsep kampus inklusi memastikan bahwa kebutuhan mahasiswa dipenuhi melalui program dan layanan yang mendukung penyandang disabilitas. 4) pendidikan inklusi menegakkan kesetaraan dan keadilan sosial, memberikan akses pendidikan berkualitas kepada semua mahasiswa, sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimal. 5) perguruan tinggi harus menyediakan dukungan dan akomodasi, termasuk bantuan emosional, material, dan fleksibilitas dalam penjadwalan, untuk mengatasi hambatan yang dihadapi mahasiswa penyandang disabilitas. 6) keberhasilan kampus inklusi memerlukan kolaborasi antara pemangku kepentingan di universitas, memastikan inklusivitas tidak hanya meningkatkan prestasi akademik, tetapi juga mendukung kesejahteraan mahasiswa penyandang disabilitas. Namun dalam penelitian juga menghasilkan temuan bahwa terdapat tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya infrastruktur yang memadai, seperti fasilitas fisik dan jalur akses yang ramah disabilitas. Selain itu, mahasiswa sering menghadapi diskriminasi dan perlakuan tidak adil, baik melalui lingkungan sosial yang tidak ramah maupun model pembelajaran yang

tidak adaptif. Kurangnya kesadaran dan pelatihan di kalangan dosen serta staf akademik juga memperburuk situasi, karena mereka kurang memahami kebutuhan inklusi. Tantangan lainnya adalah keterbatasan informasi mengenai hak-hak mahasiswa penyandang disabilitas, yang berdampak pada rendahnya minat mereka melanjutkan pendidikan tinggi. Hambatan emosional dan sosial juga kerap dihadapi mahasiswa penyandang disabilitas, yang dapat mempengaruhi retensi dan kelulusan mereka. Selain itu, keterbatasan pilihan jurusan di universitas yang menyediakan fasilitas inklusi membuat pilihan akademik mereka terbatas. Terakhir, keterlambatan implementasi kebijakan inklusi di perguruan tinggi menghambat terciptanya lingkungan yang benar-benar inklusif. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, dibutuhkan komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan, termasuk kebijakan yang mendukung kaum difabel. Maka dari itu demi mewujudkan model layanan publik yang inklusi berdasarkan hal tersebut maka Rahmawati & Putranto (2023) mengungkapkan bahwa sarana dan prasarana harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua individu, baik yang difabel maupun nondifabel. Ini mencakup aksesibilitas transportasi, jalan umum, dan bangunan publik yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Dalam hal kesehatan kita juga bisa lihat bahwa berdasarkan hasil penelitian dari Muna et al., (2022) yang menunjukkan bahwa terdapat kesediaan layanan kesehatan yang inklusif yakni dengan peran signifikan yang dilakukan oleh Rumah Kebugaran Difabel (RKD) yang berada di Yogyakarta. Dengan menyediakan layanan kesehatan yang inklusif, RKD memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang memadai terhadap program kebugaran dan rehabilitasi. Layanan ini dirancang secara khusus bagi mereka untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan kemandirian. Selain layanan kesehatan, RKD juga melakukan pemberdayaan melalui pelatihan. Penyandang disabilitas diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang relevan, seperti terapi fisik dan pijat, sehingga mereka tidak hanya dapat berkontribusi kepada masyarakat umum tetapi juga mendukung komunitas difabel lainnya. Hal ini memberikan rasa percaya diri dan mendorong kemandirian mereka. Program-program RKD juga berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan. Fasilitas kebugaran yang ramah difabel yang membuat penyandang disabilitas dapat untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik yang sesuai dengan kemampuan mereka, yang

penting bagi kesehatan fisik dan mental. Dengan adanya akses ini, penyandang disabilitas dapat menjaga kesehatan secara lebih optimal. Lebih dari itu, RKD berperan sebagai pionir dalam membangun komunitas yang inklusif, di mana penyandang disabilitas dapat berinteraksi dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial secara penuh. Hal ini membantu mengurangi stigma dan meningkatkan penerimaan sosial, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi mereka. Melalui layanan dan program ini, RKD berkontribusi besar dalam meningkatkan kebugaran dan kualitas hidup penyandang disabilitas.

Inklusi Sosial sebagai Pilar Pembangunan Berkelanjutan Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

Inklusi sosial merupakan pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan karena memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, memiliki akses dan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Hal ini dapat menciptakan keadilan sosial yang merata. Adapun alasannya adalah dengan melibatkan semua lapisan masyarakat dapat menjadikan pembangunan menjadi lebih adil dan inklusif serta mengurangi kesenjangan sosial yang seringkali menghambat perkembangan ekonomi dan sosial. Selain itu, inklusi sosial juga membantu menciptakan stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, karena potensi setiap individu dapat dimaksimalkan. Adapun konsep ini sejalan dengan hasil penelitian dari Arni Surwanti dan Warih Andan Puspitosari (2021) yang mengungkapkan bahwa Inklusi sosial dapat memastikan semua individu, tanpa memandang latar belakang. Adapun kesetaraan akses tersebut dapat mencakup akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Inklusi sosial berkontribusi pada stabilitas sosial. Ketika semua individu merasa diikutsertakan dan dihargai, potensi konflik sosial dapat diminimalkan, dan masyarakat dapat berfungsi dengan lebih baik. Dalam menanggapi hal ini, menurut penelitian dari Retno Kusumawiranti (2021) inklusi sosial diartikan sebagai nilai yang memperjuangkan masyarakat yang rawan marginalisasi untuk mencapai kondisi ideal dan menjadi subjek pembangunan dalam konteks desa. Adapun inklusi sosial tidak hanya melibatkan partisipasi kelompok terpinggirkan dalam proses pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa mereka memiliki akses yang

setara terhadap sumber daya dan manfaat dari pembangunan tersebut. Dengan melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk kelompok yang sering terpinggirkan, pembangunan dapat menjadi lebih adil dan berkelanjutan. Lebih lanjut, inklusi sosial berfungsi untuk mengatasi ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat, dengan mendorong semua warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang setara dan kesempatan yang sama, terlepas dari perbedaan yang ada. Hal ini penting untuk menciptakan stabilitas sosial, kohesi, dan solidaritas dalam jangka panjang, yang merupakan aspek penting dari keadilan sosial.

Adapun berdasarkan hasil penelitian dari Faiqul Hazmi dan Zahrotun Nafisah (2021) menunjukkan bahwa untuk mencapai keadilan sosial, lembaga keuangan mikro perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam kebijakan penyaluran pembiayaan. Ini termasuk menjadikan keadilan gender dan inklusi sosial sebagai indikator keberhasilan, mempermudah akses data berdasarkan gender, serta menghilangkan hambatan dalam regulasi yang menghalangi akses perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya terhadap pembiayaan yang lebih besar. Dengan demikian, inklusi sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan, tetapi juga sebagai strategi untuk memberdayakan seluruh masyarakat, yang pada gilirannya mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Adapun jika dilihat dari sisi arus pelayanan publik berdasarkan hasil penelitian dari Ikmal et al., (2021) dapat diketahui bahwa pelayanan publik yang inklusif dapat menjadi pilar penting bagi pembangunan yang berkeadilan sosial. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta aparatur desa merupakan langkah awal yang efektif untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya aksesibilitas layanan publik bagi semua kelompok, termasuk kelompok yang terpinggirkan. Di samping itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi perangkat desa membantu mereka dalam menyusun kebijakan dan prosedur yang lebih inklusif. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dihasilkan akan mengakomodasi kebutuhan seluruh masyarakat, sehingga menciptakan layanan yang responsif dan berkeadilan. Pendampingan dalam proses penyusunan kebijakan juga berperan besar, terutama dalam perencanaan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang ramah akses. Hal ini membuat

lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung semua lapisan masyarakat dalam mengakses layanan publik secara setara. Selain itu, dengan adanya demonstrasi praktis, masyarakat dan aparat desa dapat melihat secara langsung contoh nyata dari implementasi pelayanan publik yang inklusif. Melalui pendekatan ini, mereka bisa merasakan manfaatnya serta memahami cara-cara penerapannya dalam konteks desa atau lingkungan masing-masing.

Adapun dalam mewujudkan keadilan sosial di bidang kesehatan yang inklusif maka menurut hasil pengabdian masyarakat dari Sari et al., (2023) dapat dijelaskan bahwa ternyata bukan hanya offline saja tetapi dengan media offline bisa menjadi sarana yang mudah dan lebih inklusif. Melalui platform digital, semua orang tua, termasuk yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas, dapat mengakses informasi tentang pencegahan dan penanganan stunting. Hal ini bahwa penyandang disabilitas dan kelompok rentan juga mendapatkan akses yang setara. Selain itu, e-counseling mendorong partisipasi aktif dari orang tua, mereka dapat bertanya dan berdiskusi tentang kesehatan anak mereka dalam lingkungan yang inklusif. Program ini juga memberdayakan kader kesehatan yang dilatih untuk memberikan konseling dan dukungan, termasuk kader yang memiliki disabilitas, sehingga memperkuat jaringan sosial dan meningkatkan kapasitas komunitas dalam menangani stunting. Pendekatan psikologis dan emosional yang diterapkan dalam e-counseling memberikan dukungan lebih dari sekadar informasi teknis; program ini membantu orang tua mengatasi stigma dan menumbuhkan kepercayaan diri dalam merawat anak-anak mereka. Selain itu, program ini memonitoring dan mengevaluasi secara berkelanjutan yang mendukung penyesuaian intervensi agar semua kelompok masyarakat, termasuk yang terpinggirkan, mendapatkan manfaat yang sama. Sebagai sarana edukasi, e-counseling juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan anak, membangun budaya peduli yang inklusif dan berkesinambungan. E-counseling dengan demikian berperan penting tidak hanya dalam penanganan stunting tetapi juga dalam memberdayakan masyarakat, memperluas akses informasi, dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya kesehatan secara inklusif.

Strategi efektivitas pemberdayaan dalam mengatasi peningkatan eksklusi sosial di era modern

Setelah penerapan inklusi sosial, eklusi sosial dapat diartikan sebagai strategi atau tindakan yang membatasi atau menyingkirkan kelompok tertentu dari akses atau partisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian dari Rifqi (2024) menunjukkan bahwa strategi efektivitas pemberdayaan untuk mengatasi eksklusi sosial di era modern dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan yakni : 1) dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang mana merupakan kunci untuk meningkatkan keterampilan masyarakat terpinggirkan agar dapat berpartisipasi lebih baik dalam ekonomi dan sosial, membantu mereka meningkatkan kualitas hidup. 2) membangun Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mana hal ini dinilai penting untuk membangun kolaborasi dan berbagi sumber daya di antara masyarakat, sehingga meningkatkan partisipasi dalam pembangunan. 3) memiliki akses terhadap layanan dan sumber daya yang mana harus diperluas agar setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. 4) partisipasi dalam pengambilan keputusan yang mana hal ini dapat diperkuat melalui forum diskusi dan konsultasi publik, sehingga masyarakat memiliki peran aktif dalam keputusan yang memengaruhi hidup mereka. 5) kampanye kesadaran dan advokasi yang diperlukan untuk membangun pemahaman mengenai eksklusi sosial dan pentingnya inklusi, sekaligus mendorong kebijakan yang mendukung pemberdayaan masyarakat. 6) melalui penggunaan teknologi yang dapat membuka akses informasi dan layanan, serta menghubungkan masyarakat terpinggirkan dengan peluang ekonomi yang lebih luas. Dengan penerapan strategi ini, diharapkan eksklusi sosial dapat berkurang dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat inklusif merupakan strategi penting untuk mencapai keadilan sosial dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, dan masyarakat miskin, dalam berbagai aspek pembangunan. Dalam bidang pendidikan, pemberdayaan inklusif meningkatkan akses setara ke pendidikan,

memastikan bahwa semua individu, termasuk mereka yang terpinggirkan, mendapatkan kesempatan belajar dan berkembang. Dengan adanya pendidikan inklusif yang inklusif bagi setiap individu dapat berguna untuk menguatkan potensi secara maksimal dan berkontribusi secara produktif, yang pada gilirannya mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Pada aspek kesehatan, pemberdayaan inklusif dapat membuat akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau tinggal di daerah terpencil. Program kesehatan yang inklusif, seperti layanan rehabilitasi khusus dan fasilitas kebugaran ramah difabel, membantu kelompok rentan menjaga kesehatan fisik dan mental. Layanan e-counseling untuk penanganan masalah kesehatan seperti stunting juga menjadi bentuk pemberdayaan yang memberikan akses informasi dan dukungan emosional yang merata. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan inklusif ini memperkuat kohesi sosial serta mendukung keberlanjutan pembangunan yang adil dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan melalui Perspektif Ekonomi Syariah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 729–738.
- Antiwi, R. (2021). *Strategi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah Dalam Pengelolaan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Anwar, M. (2022). Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343–356.
<https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1S.1905>
- Atmi, R. T., Gunarti, E., Mutia, F., & Prihatini, I. C. (2022). Peningkatan literasi masyarakat melalui perpustakaan desa berbasis inklusi sosial. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 5(3), 486–497.
- Dewi, R. K., Pramana, R. P., Sadaly, H., Dewi, R. K., Pramana, R. P., & Sadaly, H. (2020). Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas. *The SMERU Research Institute*.
- Diana, M., Yanto, Y., & Pirmansyah, R. (2021). Pemberdayaan Masyarakat melalui Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial (Studi Kasus Perpustakaan “Sumber Ilmu” Desa Marga Sakti Kabupaten Musirawas). *Tik Ilmu: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 5(1), 57.
<https://doi.org/10.29240/tik.v5i1.2389>
- Fathy, R. (2019). Modal sosial: Konsep, inklusivitas dan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1–17.
- Gutama, P. P. B., & Widiyahseno, B. (2020). Inklusi Sosial dalam Pembangunan Desa. *REFORMASI*, 10(1), 70–80.
- Hafshah, D. R., & Nugraheni, N. (2024). Dinamika Kesetaraan Pendidikan sebagai Fondasi SDGS. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, 1(3), 142–150.
- Hakim, M. L. (2024). *Kebijakan Sosial: Teori dan Praktik*. Universitas Brawijaya Press.
- Hariyono, T. (2020). Partisipasi perempuan desa karangsari dalam mewujudkan pembangunan inklusif. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 9(2), 281–298.
- Hazmi, F., & Nafisah, Z. (2021). Evaluasi Dampak Penyaluran Pembiayaan Mikro Syariah Pada Kesetaraan, Keadilan Gender dan Inklusi Sosial. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 99–112.
[https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6268](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6268)
- Ikmal, N. M., Holifah, N., Hidayati, L. N., & Moi, P. N. (2021). Pengarustamaan pelayanan publik inklusif di tingkat desa. *Prosiding Seminar Abdimas Indonesia (SAI)*, 1(1), 1–11.
- Insiatun, I., Karya, G., Ediyanto, E., & Sunandar, A. (2021). Implementasi Pendidikan Inklusi pada Jenjang PAUD. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, Dan Pengelolaan Pendidikan*, 1(11), 873–878.
- Isdijoso, W., Suryahadi, A., & Akhmadi, A. (2016). Penetapan kriteria dan variabel pendataan penduduk miskin yang komprehensif dalam rangka perlindungan penduduk miskin di Kabupaten/Kota. *Kota, Kertas Kerja SMERU, The SMERU Research Institute*.
- Kusumawiranti, R. (2021). Pengarusutamaan

- gender dan inklusi sosial dalam pembangunan desa. *Populika*, 9(1), 12–19.
- Luthfia, A. R. (2020). Urgensi pemberdayaan penyandang disabilitas di masa pandemi. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 38–44.
- Muna, C., Arifin, Z., & Mauliansyah, R. (2022). Mewujudkan Pembangunan Inklusi: Peran Rumah Kebugaran Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Social Development Studies*, 3(2).
- Ngoyo, M. F. (2015). Mengawal sustainable development goals (SDGs); meluruskan orientasi pembangunan yang berkeadilan. *Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 1(1).
- Nurul Fitriani Eko, S. (2021). *Nilai-Nilai Inklusif dalam Program Pendampingan Disabilitas di Rumah Inklusif Kebumen*. IAIN Purwokerto.
- Panuluh, S., & Fitri, M. R. (2016). Perkembangan pelaksanaan sustainable development goals (SDGs) di Indonesia. *Biefing Paper*, 2(1), 1–25.
- Pellu, A. (2024). Peningkatan Akses Keuangan: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(2), 279–295.
- Puspitosari, W. A., Satria, F. E., & Surwati, A. (2022). Tantangan Mewujudkan Kampus Inklusi di Pendidikan Tinggi dalam Telaah Literatur. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 7(1), 55–67.
- Ra'is, D. U. (2018). Peta inklusi sosial dalam regulasi desa. *Reformasi*, 7(2).
- Rahmawati, R., & Putranto, H. A. (2023). Model Layanan Publik Ramah Difabel Inisiatif Membangun Kota Inklusi: Diffable-Friendly Public Service Model Building Initiatives The City of Inclusion. *Pencerah Publik*, 10(1), 37–55.
- Renie, E. (2020). Partisipasi Perempuan Dalam Ekonomi Inklusif. *AGENDA: Jurnal Analisis Gender dan Agama*, 2(1), 10–17.
- Rifqi, M. (2024). *Peran Forum Bangun Aceh (FBA) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Inklusi Sosial Melalui Kelompok Swadaya Masyarakat Ingin Maju (Studi Di Gampong Luthu Dayah Krueng Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar)*. UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Rizky, U. F. (2021). Pelatihan Inklusif Advokasi Kebijakan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Komunitas
- SOBAT Difabel. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 1(1), 57–68.
- Sari, I. Y., Pujiastuti, D., Indrawati, N., Prawesti, I., Palupi, E., & Febriyanti, S. (2023). Upaya Penanganan Stunting Melalui Ecounseling dengan Pendekatan Inklusi di Rural Area. *Aptekmas Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 6(4), 74–79.
- Siregar, N. A. M., & Purbantara, A. (2020). Melawan Stigma Diskriminatif Strategi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Desa Panggunharjo. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 04(01), 23–44.
- Sudarsana, I. K. (2015). Peningkatan mutu pendidikan luar sekolah dalam upaya pembangunan sumber daya manusia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 1(01), 1–14.
- Sulaiman, E. S. (2021). *Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan: Teori dan implementasi*. UGM PRESS.
- Supriatna, M. (2009). Bimbingan dan konseling lintas budaya. *Materi PLPG PPB, FIP, UPI*.
- Surwanti, A., & Puspitosari, W. A. (2021). Penguatan Kader Rehabilitasi Berbasis Masyarakat guna Mewujudkan Masyarakat yang Inklusif. *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*.
<https://doi.org/10.18196/ppm.32.199>
- Vårheim, A., Skare, R., & Lenstra, N. (2019). Examining libraries as public sphere institutions: Mapping questions, methods, theories, findings, and research gaps. *Library & Information Science Research*, 41(2), 93–101.
<https://doi.org/10.1016/j.lisr.2019.04.001>